



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO**

TAHUN ANGGARAN 2016

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang.....3

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657);
30. Peraturan Menteri.....5

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
31. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Ketentuan umum Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bungo yang dibuat oleh Bupati dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya yang lebih tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

9. Program adalah.....6

9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Tahun Anggaran 2016 meliputi masa 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 118.736.601.277,50
b. Dana Perimbangan	Rp. 971.929.601.372,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. <u>233.329.801.271,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.1.323.996.003.920,50

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp. 584.622.543.159,00
2). Belanja Bunga	Rp. 0,00
3). Belanja Subsidi	Rp. 606.744.000,00
4). Belanja Hibah	Rp. 20.299.400.000,00
5). Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,00
6). Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.041.893.800,00
7). Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 110.291.540.864,00
8). Belanja Tidak Terduga	Rp. <u>1.000.000.000,00</u>
	Rp. 717.862.121.823,00

b. Belanja Langsung :

1). Belanja Pegawai	Rp. 117.006.548.500,00
2). Belanja Barang dan Jasa	Rp. 255.770.066.649,62
3). Belanja Modal	Rp. <u>179.649.804.599,00</u>
	Rp. 552.426.419.748,62
Jumlah Belanja	Rp. 1.270.288.541.571,62
Surplus	Rp. 53.707.462.348,88

3. Pembiayaan.....7

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	53.707.462.348,88
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	53.707.462.348,88
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) Rp.0,00		

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II dan Peraturan Bupati Ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.1 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2).Format Lampiran IV.....8

- (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.2 Peraturan Bupati ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 9

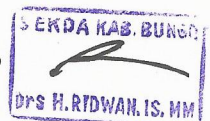
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

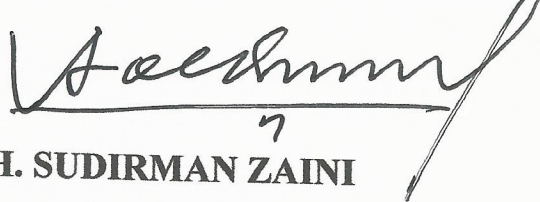
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 30 Desember 2015

TELAH DITELITI OLEH :	
KABID ANGGARAN,  YURNALIS, SE NIP. 19700624 200312 1 002	KEPALA BPKAD,  H. IZUDIN, SE, ME NIP. 19630609 199203 1 010

BUPATI BUNGO,




H. SUDIRMAN ZAINI

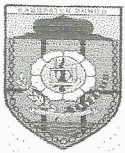
Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal, 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 33

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU  HAMBALI, SH NIP. 19760416 200212 1 005	KABAG HUKUM,  RAHMAD HARIJADI, SH NIP. 19660910 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN PENJABARAN APBD

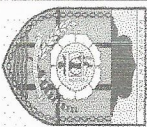
TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	
		1.323.996.003.920,50
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
		118.736.601.277,50
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.873.911.800,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.147.776.947,50
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.323.526.826,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	85.391.385.704,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	
		971.929.601.372,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	227.329.886.372,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	641.635.025.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	102.964.690.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
		233.329.801.271,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	49.151.300.271,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	184.178.501.000,00
2	BELANJA	
		1.270.288.541.571,62
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
		717.862.121.823,00
2.1.1	Belanja Pegawai	584.622.543.159,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	606.744.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	20.299.400.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.041.893.800,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	110.291.540.864,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	
		552.426.419.748,62
2.2.1	Belanja Pegawai	117.044.623.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	264.195.149.649,62
2.2.3	Belanja Modal	171.186.646.599,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	53.707.462.348,88
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
		0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
		53.707.462.348,88
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	52.207.462.348,88
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.707.462.348,88)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Muara Bungo, December 2015

BUPATI BUNGO SEKDA KAB. BUNGO

[Signature]
 H.SUDIRMAN ZAINI



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Lampiran Ia Penjabara APBD
Nomor : 31
Tanggal : 30 December 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.323.996.003.920,50	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	118.736.601.277,50	
4.1.1.01	Pajak Hotel	24.873.911.800,00	
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	851.201.800,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	600.000.000,00	Perda No 5 Tahun 2012 Pajak Hotel
4.1.1.02	Pajak Restoran	251.201.800,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.436.000.000,00	
4.1.1.02.02	Rumah Makan	310.000.000,00	Perda No 6 Tahun 2012 Pajak Restoran/R. Makan
4.1.1.03	Pajak Hiburan	1.126.000.000,00	
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tarif/Busana	429.310.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	4.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	163.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.15	Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.16	Parti Pijat/Refleksi	221.810.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.17	Mandi Uap/Spa	16.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.03.18	Pusat Kebugaran	2.500.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04	Pajak Reklame	14.000.000,00	Perda No 7 Tahun 2012 Pajak Hiburan
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videootron/Megatron	1.767.000.000,00	
4.1.1.04.02	Reklame kain	1.430.800.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	198.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	1.200.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.500.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.04.11	Reklame Banner	47.000.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	87.500.000,00	Perda No 3 Tahun 2012 Pajak Reklame
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	14.500.000.000,00	
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	14.497.700.000,00	Perda No 4 Tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan
		2.300.000,00	Perda No 4 Tahun 2012 Pajak Penerangan Jalan

URUT	URAIAN	JUMLAH	WASAK NUMUM
1	2	3	4
5.2.3.81.02	Belanja Modal Jalan, Jangsi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	5.369.467.000,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	182.720.000,00	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	167.720.000,00	
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	15.000.000,00	
5.2.3.86	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	335.165.000,00	
5.2.3.86.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam	335.165.000,00	
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	51.000.000,00	
5.2.3.87.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan	51.000.000,00	
5.2.3.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	2.000.000,00	
5.2.3.88.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias	2.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	53.707.462.348,88	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akrbat Lainnya	0,00	
6.1.1.04.12	Penghematan Belanja	0,00	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	
6.1.4.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	
6.1.4.01.01	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	53.707.462.348,88	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	
6.2.2.02.02	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pancuran Telago	1.500.000.000,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	52.207.462.348,88	
6.2.3.11	Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo kepada Pihak Ketiga	52.207.462.348,88	
6.2.3.11.01	Pembayaran Utang Pokok pada Pihak Ketiga	52.207.462.348,88	
	PEMBIAYAAN NETTO	(53.707.462.348,88)	

KUNJUNGAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed By: Siman

Muara Bungo, Desember 2015

BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINTI

TELAM DITETAP SESUAI KETENTUAN

KASUBBAG PUU

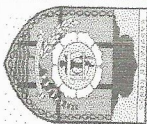
KABAG HUKUM

HAMBALI, SH

RAHMAD HARIJADI, SH

NIP 19750415 2007121 005

NIP 19650910 1993031 004



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

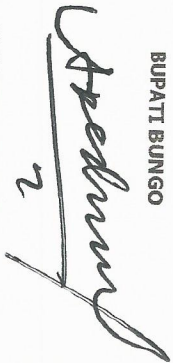
Lampiran II Penjabara APBD
Nomor : 31
Tanggal : 30 December 2015

Urusan Pemerintahan : 2.03 Organisasi : 2.03.01 Sub Unit Organisasi : 2.03.01.01		Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.203.01.00.00.5	BELANJA		
2.03.203.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.000.177.626,00	
2.03.203.01.00.00	Non Kegiatan	2.942.895.996,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.942.895.996,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.178.638.996,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.582.161.633,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	165.590.893,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	213.150.000,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	37.836.645,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	87.223.854,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	38.370.953,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	25.340,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.09	Turan Asuransi Kesehatan	43.035.636,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.21	Turan Jaminan Kecelakaan Kerja	4.997.358,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.01.22	Turan Jaminan Kematian	6.246.684,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	764.257.000,00	
2.03.203.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	764.257.000,00	
2.03.203.01.01.01.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.057.281.630,00	
2.03.203.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	815.680.100,00	
2.03.203.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Bungo
2.03.203.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.380.000,00	
2.03.203.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.380.000,00	
2.03.203.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.380.000,00	
2.03.203.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Muara Bungo
2.03.203.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.200.000,00	

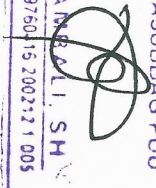
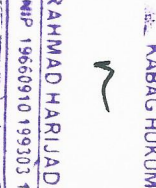
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENDELASAN
1	2	3	4
2.03.203.01.18.03.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.850.000,00	
2.03.203.01.18.03.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.160.850,00	
2.03.203.01.18.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.850,00	
2.03.203.01.18.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.510.850,00	
2.03.203.01.18.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Pengandaan	1.800.000,00	
2.03.203.01.18.03.5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	1.800.000,00	
2.03.203.01.18.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.850.000,00	
2.03.203.01.18.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.850.000,00	
2.03.203.01.18.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.000.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(8.000.177.626,00)	

TELAH DITELITI OLEH

KABAG ANGGARAN	MELUKA BPNAB
	
H. IDRUS SE	H. IDRUS SE
NIP 15100624 200312 1 002	NIP 19630609 199203 1 019

Muara Bungo, December 2015
BUPATI BUNGO

H.SUDIRMAN ZAINI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN

KASUBAG PUU	KABAG HUKUM
	
H. ANBALLI SH	RAHMAD HARIJADI SH
NIP 19760115 200212 1 005	NIP 19660910 199303 1 004

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
	Belanja Hibah		
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi		20,299,400,000.00
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta		5,768,400,000.00
1	APKASI		2,660,400,000.00
	Asosiasi pemerintah kab. bungo seluruh Indonesia		15,000,000.00
2	KONI	Kabupaten Bungo	15,000,000.00
	Komite Olahraga Nasional Indonesia (Koni) Kab. Bungo	Kabupaten Bungo	2,425,400,000.00
			2,425,400,000.00
3	PRAMUKA		
	Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Bungo	Kabupaten Bungo	200,000,000.00
			200,000,000.00
4	KOMDA LANSIA		
	Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA) Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	20,000,000.00
			20,000,000.00
	Organisasi Kemasyarakatan		
5	Korpri		3,108,000,000.00
	Korps Pegawai Republik Indonesi Dewa Pengurus Cabang Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo	200,000,000.00
			200,000,000.00
6	Lembaga Adat		
	Lembaga Adat	Kabupaten Bungo	250,000,000.00
			250,000,000.00
7	PMI		
	Palang merah Indonesia cabang bungo	Kabupaten Bungo	150,000,000.00
			150,000,000.00

8	MUI							100,000,000.00	
	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Kabupaten Bungo						100,000,000.00	
9	LPTQ							1,500,000,000.00	
	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	Kabupaten Bungo						1,500,000,000.00	
10	BAZDA							60,000,000.00	
	Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)	Kabupaten Bungo						60,000,000.00	
11	Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)							500,000,000.00	
	Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)	Kabupaten Bungo						500,000,000.00	
12	Markas Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bungo (LVRI)							63,000,000.00	
	Markas Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Bungo (LVRI)	Kabupaten Bungo						63,000,000.00	
13	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Muara Bungo							35,000,000.00	
	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Muara Bungo	Kabupaten Bungo						35,000,000.00	
14	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Bungo-Jambi							250,000,000.00	
	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Bungo-Jambi							250,000,000.00	
	Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat							14,531,000,000.00	
	Belanja Hibah kepada Kelompok/ Anggota Masyarakat/ Perorangan	Kabupaten Bungo						431,000,000.00	
15	Masjid							335,000,000.00	
	1 Masjid Al Falah	Dusun Empelu Kec. Tanah Sepenggal Kab. Bungo						10,000,000.00	
	2 Masjid Al-Hikmah	Dusun Sei. Mengkuang Kec. Rimbo Tengah						10,000,000.00	
	3 Masjid Nurul Yaqin	Jln. Rangkaya Hitam Rt.18 Rw.07 Kel. Jaya Setia Kec. Pasar Muara Bungo Kab. Bungo						10,000,000.00	
	4 Masjid Baiturrahman	Dusun Rantel. Rt 02. Kampung Simpang Tiga						10,000,000.00	
	5 Masjid At-Taqwa	Dusun Teluk Panjang Kec. Bathin III Kab. Bungo						10,000,000.00	
	6 Masjid Baitul Rahmad	Desa Panjang Kecamatan Tanah Tumbuh						10,000,000.00	
	7 Masjid Jami' Sungai Lili	Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas						15,000,000.00	
	8 Masjid Baiturrahman	Dusun Maju Jaya Kecamatan Pelepatan Ilir						10,000,000.00	
	9 Masjid Nurul Iman	Dusun Perumyian Kecamatan Limbur Lubuk						10,000,000.00	
	10 Masjid Baiturrahman	Dusun Talang Sungai Bungo Kecamatan Rantau						15,000,000.00	

	11	Masjid Ar Rahman	Dusun Tuo Rantau Pandan	10,000,000.00
	12	Masjid Nurul Yaqin	Lrg.Merpati Rt 25 Rw 09 Kel. Pasir Putih	10,000,000.00
	13	Masjid Istiqomah	Dusun Pasar Rantau embancang Kecamatan Tanah	10,000,000.00
	14	Masjid Baiturrahma	Dusun Peninjau Kecamatan Bathin II Pelayang	10,000,000.00
	15	Masjid Aminatun Munawaroh	Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II	10,000,000.00
	16	Masjid Radaul Saadah	Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang	10,000,000.00
	17	Masjid Baiturrahim	Kampung Tanjung Beringin Kecamatan Tanah	10,000,000.00
	18	Masjid Nurul Takwa	Rt.10 Rw04 Kel. Bungo Timur Kecamatan Pasar	10,000,000.00
	19	Masjid Al Ikhlas	Rt. 15 Rw. 05 Kel. Cadika Kecamatan Rimbo	15,000,000.00
	20	Masjid Nurul Iman	Rt. 24 Rw. 07 Kel. Pasir Putih Kecamatan Rimbo	10,000,000.00
	21	Masjid Al Mujahirin	Dusun Babeko Kecamatan Bathin II Babeko	15,000,000.00
	22	Masjid Al Mugeram	Ds. Manggis Kecamatan Bathin III	15,000,000.00
	23	Masjid Al Falah	Babeko Kecamatan Bathin II Babeko	15,000,000.00
	24	Masjid Jamiul Mukminin	Ds. Baru Lubuk Mengkuang Kec. Limbur Lubuk	15,000,000.00
	25	Masjid Baiturrahman	Kampung Baru Sepungur Kecamatan Bathin II	15,000,000.00
	26	Masjid Al Ikhсан	Sei. Arang Kecamatan Bungo Dani	15,000,000.00
	27	Masjid Jami'	Ds. Talang Pantai Kec. Bungo Dani	15,000,000.00
	28	Masjid Jihadul Ikhسان	BTN Lintas Asri Kel. Sungai Kerjan Kecamatan	15,000,000.00
16		Musholla		96,000,000.00
	1	Musholla Al-An'hur	Jln. Pendidikan Kampung Limau Sundai Ds.	8,000,000.00
	2	Musholla Nurul Ikhwān	Rt. 02 Dusun Sarana Jaya Kecamatan Bathin III	8,000,000.00
	3	Musholla Al Iklas	Dusun Peranti Luweh Kecamatan Tanah Tumbuh	8,000,000.00
	4	Musholla Al Muttaqin	Dusun Pauh Agung Kecamatan Limbur Lubuk	8,000,000.00
	5	Musholla Nurul Huda	Dusun Danau Kecamatan Pelepat Ilir	8,000,000.00
	6	Musholla Al-Jariah	Rt. 23 Rw. 07 Kel. Pasir Putih Kecamatan Rimbo	8,000,000.00
	7	Musholla Assuadah	Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bungo Timur Kecamatan Pasar Bungo	8,000,000.00
	8	Musholla STAI Yasni	Jalan Lintas Sumatra KM 4 Arah Padang Kecamatan Bathin III	4,000,000.00
	9	Musholla Baiturrahim	Jalan Kult Manis Rt. 10 Rw. 11 Kel. Sungai Kerjan	8,000,000.00
	10	Musholla Nurul Hikmah	Rw. 06 Kel. Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani	8,000,000.00
	11	Musholla Annur	Jln. Sungai Tenang Rt.07 Dusun Rantau Ikl	8,000,000.00
	12	Musholla Nurul Iman	Rt.02 Rw.01 Kel. Tanjung Gedang Kecamatan	8,000,000.00
	13	Musholla Baiturrahink	Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal	4,000,000.00
17		Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat PDPM		14,100,000,000.00
1		UPK Kecamatan Bathin III		500,000,000.00
	1	Dusun Purwo Bakti	Dusun Purwo Bakti	100,000,000.00

	2	Dusun Air Gemuruh	Dusun Air Gemuruh	100,000,000.00
	3	Dusun Lubuk Benteng	Dusun Lubuk Benteng	100,000,000.00
	4	Dusun Sarana Jaya	Dusun Sarana Jaya	100,000,000.00
	5	Dusun Teluk Panjang	Dusun Teluk Panjang	100,000,000.00
2		UPK Kecamatan Muko - Muko Bathin VII		900,000,000.00
	1	Dusun Tanjung Agung	Dusun Tanjung Agung	100,000,000.00
	2	Dusun Bedaro	Dusun Bedaro	100,000,000.00
	3	Dusun Datar	Dusun Datar	100,000,000.00
	4	Dusun Tebing Tinggi	Dusun Tebing Tinggi	100,000,000.00
	5	Dusun Suka Jaya	Dusun Suka Jaya	100,000,000.00
	6	Dusun Tebat	Dusun Tebat	100,000,000.00
	7	Dusun Baru Pusat Jalo	Dusun Baru Pusat Jalo	100,000,000.00
	8	Dusun Mangun Jayo	Dusun Mangun Jayo	100,000,000.00
	9	Dusun Pekan Jum'at	Dusun Pekan Jum'at	100,000,000.00
3		UPK Kecamatan Jujuhan		1,000,000,000.00
	1	Dusun Sirih Sekapur	Dusun Sirih Sekapur	100,000,000.00
	2	Dusun Rantau Iki	Dusun Rantau Iki	100,000,000.00
	3	Dusun Tanjung Belit	Dusun Tanjung Belit	100,000,000.00
	4	Dusun Ujung Tanjung	Dusun Ujung Tanjung	100,000,000.00
	5	Dusun Pulau Jelmu	Dusun Pulau Jelmu	100,000,000.00
	6	Dusun Talang Pemesun	Dusun Talang Pemesun	100,000,000.00
	7	Dusun Jumbak	Dusun Jumbak	100,000,000.00
	8	Dusun Rantau Panjang	Dusun Rantau Panjang	100,000,000.00
	9	Dusun Sirih Sekapur Perkembangan	Dusun Sirih Sekapur Perkembangan	100,000,000.00
	10	Dusun Baru Balai Panjang	Dusun Baru Balai Panjang	100,000,000.00
4		UPK Kecamatan Pelepat Ilir		1,700,000,000.00
	1	Dusun Purwosari	Dusun Purwosari	100,000,000.00
	2	Dusun Karya Harapan Mukti	Dusun Karya Harapan Mukti	100,000,000.00
	3	Dusun Tirta Mulya	Dusun Tirta Mulya	100,000,000.00
	4	Dusun Daya Murri	Dusun Daya Murri	100,000,000.00
	5	Dusun Danau	Dusun Danau	100,000,000.00
	6	Dusun Lingga Kuamang	Dusun Lingga Kuamang	100,000,000.00
	7	Dusun Bangun Harjo	Dusun Bangun Harjo	100,000,000.00
	8	Dusun Padang Palangeh	Dusun Padang Palangeh	100,000,000.00
	9	Dusun Kotojajo	Dusun Kotojajo	100,000,000.00
	10	Dusun Lembah Kuamang	Dusun Lembah Kuamang	100,000,000.00

	11	Dusun Kuning Gading	Dusun Kuning Gading	100,000,000.00
	12	Dusun Lubuk	Dusun Lubuk	100,000,000.00
	13	Dusun Maju Jaya	Dusun Maju Jaya	100,000,000.00
	14	Dusun Sumber Mulia	Dusun Sumber Mulia	100,000,000.00
	15	Dusun Muara Kuamang	Dusun Muara Kuamang	100,000,000.00
	16	Dusun Kuamang Jaya	Dusun Kuamang Jaya	100,000,000.00
	17	Dusun Sumber Harapan	Dusun Sumber Harapan	100,000,000.00
5		UPK Kecamatan Tanah Sepenggal		1,000,000,000.00
	1	Dusun Tenam	Dusun Tenam	100,000,000.00
	2	Dusun Teluk Pandak	Dusun Teluk Pandak	100,000,000.00
	3	Dusun Empelu	Dusun Empelu	100,000,000.00
	4	Dusun Telentam	Dusun Telentam	100,000,000.00
	5	Dusun Tanjung	Dusun Tanjung	100,000,000.00
	6	Dusun Pasar Rantau Embacang	Dusun Pasar Rantau Embacang	100,000,000.00
	7	Dusun Tanah Bekail	Dusun Tanah Bekail	100,000,000.00
	8	Dusun Sungai Gambir	Dusun Sungai Gambir	100,000,000.00
	9	Dusun Pasar Lubuk Landai	Dusun Pasar Lubuk Landai	100,000,000.00
	10	Dusun Candi	Dusun Candi	100,000,000.00
6		UPK Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas		1,200,000,000.00
	1	Dusun Paku Aji	Dusun Paku Aji	100,000,000.00
	2	Dusun Sungai Puri	Dusun Sungai Puri	100,000,000.00
	3	Dusun Rantau Embacang	Dusun Rantau Embacang	100,000,000.00
	4	Dusun Embacang Gedang	Dusun Embacang Gedang	100,000,000.00
	5	Dusun Sungai Tembang	Dusun Sungai Tembang	100,000,000.00
	6	Dusun Pematang Panjang	Dusun Pematang Panjang	100,000,000.00
	7	Dusun Sungai Mancur	Dusun Sungai Mancur	100,000,000.00
	8	Dusun Tanah Perbuk	Dusun Tanah Perbuk	100,000,000.00
	9	Dusun Lubuk Landai	Dusun Lubuk Landai	100,000,000.00
	10	Dusun Tebing Tinggi	Dusun Tebing Tinggi	100,000,000.00
	11	Dusun Sungai Lilin	Dusun Sungai Lilin	100,000,000.00
	12	Dusun Rantau Makmur	Dusun Rantau Makmur	100,000,000.00
7		UPK Kecamatan Bathin II Babeko		600,000,000.00
	1	Dusun Simpang Babeko	Dusun Simpang Babeko	100,000,000.00
	2	Dusun Tanjung Menanti	Dusun Tanjung Menanti	100,000,000.00
	3	Dusun Babeko	Dusun Babeko	100,000,000.00
	4	Dusun Suka Makmur	Dusun Suka Makmur	100,000,000.00
	5	Dusun Sepungur	Dusun Sepungur	100,000,000.00

	6	Dusun Tuo Sepungur	Dusun Tuo Sepungur	100,000,000.00
8				
		UPK Kecamatan Rantau Pandan		600,000,000.00
	1	Dusun Rantau Duku	Dusun Rantau Duku	100,000,000.00
	2	Dusun Rantau Pandan	Dusun Rantau Pandan	100,000,000.00
	3	Dusun Lubuk Kayu Aro	Dusun Lubuk Kayu Aro	100,000,000.00
	4	Dusun Lubuk Mayan	Dusun Lubuk Mayan	100,000,000.00
	5	Dusun Talang Sungai Bungo	Dusun Talang Sungai Bungo	100,000,000.00
	6	Dusun Leban	Dusun Leban	100,000,000.00
9		UPK Kecamatan Tanah Tumbuh		1,100,000,000.00
	1	Dusun Koto Jayo	Dusun Koto Jayo	100,000,000.00
	2	Dusun Lubuk Nilur	Dusun Lubuk Nilur	100,000,000.00
	3	Dusun Teluk Kecimbung	Dusun Teluk Kecimbung	100,000,000.00
	4	Dusun Tebing Tinggi Uleh	Dusun Tebing Tinggi Uleh	100,000,000.00
	5	Dusun Rembah	Dusun Rembah	100,000,000.00
	6	Dusun Tanah Tumbuh	Dusun Tanah Tumbuh	100,000,000.00
	7	Dusun Panjang	Dusun Panjang	100,000,000.00
	8	Dusun Perenti Luweh	Dusun Perenti Luweh	100,000,000.00
	9	Dusun Bukit Kemang	Dusun Bukit Kemang	100,000,000.00
	10	Dusun Pedukun	Dusun Pedukun	100,000,000.00
	11	Dusun Renah Jelmu	Dusun Renah Jelmu	100,000,000.00
10		UPK Kecamatan Pelepat		1,500,000,000.00
	1	Dusun Senamat	Dusun Senamat	100,000,000.00
	2	Dusun Rantau Kelayang	Dusun Rantau Kelayang	100,000,000.00
	3	Dusun Sungai Gurun	Dusun Sungai Gurun	100,000,000.00
	4	Dusun Mulia Bakti	Dusun Mulia Bakti	100,000,000.00
	5	Dusun Baru Pelepat	Dusun Baru Pelepat	100,000,000.00
	6	Dusun Dwi Karya Bakti	Dusun Dwi Karya Bakti	100,000,000.00
	7	Dusun Cilodang	Dusun Cilodang	100,000,000.00
	8	Dusun Batu Kerbau	Dusun Batu Kerbau	100,000,000.00
	9	Dusun Sungai Beringin	Dusun Sungai Beringin	100,000,000.00
	10	Dusun Balai Jaya	Dusun Balai Jaya	100,000,000.00
	11	Dusun Gapura suci	Dusun Gapura suci	100,000,000.00
	12	Dusun Mulia Jaya	Dusun Mulia Jaya	100,000,000.00
	13	Dusun Rantel	Dusun Rantel	100,000,000.00
	14	Dusun Sekampil	Dusun Sekampil	100,000,000.00
	15	Dusun Bukit Telago	Dusun Bukit Telago	100,000,000.00

1.1	UPK Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang		1,400,000,000.00
	1 Dusun Rantau Tipu	Dusun Rantau Tipu	100,000,000.00
	2 Dusun Pemunyan	Dusun Pemunyan	100,000,000.00
	3 Dusun Sekar Mengkuang	Dusun Sekar Mengkuang	100,000,000.00
	4 Dusun Tuo Lubuk Mengkuang	Dusun Tuo Lubuk Mengkuang	100,000,000.00
	5 Dusun Renah Sungai Ipuh	Dusun Renah Sungai Ipuh	100,000,000.00
	6 Dusun Tuo Limbur	Dusun Tuo Limbur	100,000,000.00
	7 Dusun Tebo Jaya	Dusun Tebo Jaya	100,000,000.00
	8 Dusun Lubuk Tanah Terban	Dusun Lubuk Tanah Terban	100,000,000.00
	9 Dusun Pauh Agung	Dusun Pauh Agung	100,000,000.00
	10 Dusun Baru Lubuk Mengkuang	Dusun Baru Lubuk Mengkuang	100,000,000.00
	11 Dusun Limbur Baru	Dusun Limbur Baru	100,000,000.00
	12 Dusun Renah Sungai Besar	Dusun Renah Sungai Besar	100,000,000.00
	13 Dusun Tanjung Bungo	Dusun Tanjung Bungo	100,000,000.00
	14 Dusun Muara Tebo Pandak	Dusun Muara Tebo Pandak	100,000,000.00
1.2	UPK Kecamatan Bathin III Ulu		900,000,000.00
	1 Dusun Buat	Dusun Buat	100,000,000.00
	2 Dusun Senamat Ulu	Dusun Senamat Ulu	100,000,000.00
	3 Dusun Muara Buat	Dusun Muara Buat	100,000,000.00
	4 Dusun Laman Pajang	Dusun Laman Pajang	100,000,000.00
	5 Dusun Karak Apung	Dusun Karak Apung	100,000,000.00
	6 Dusun Sungai Telang	Dusun Sungai Telang	100,000,000.00
	7 Dusun Timbolasi	Dusun Timbolasi	100,000,000.00
	8 Dusun Aur Cino	Dusun Aur Cino	100,000,000.00
	9 Dusun Lubuk Beringin	Dusun Lubuk Beringin	100,000,000.00
1.3	UPK Kecamatan Jujuhan Ilir		700,000,000.00
	1 Dusun Sari Mulya	Dusun Sari Mulya	100,000,000.00
	2 Dusun Bukit Sari	Dusun Bukit Sari	100,000,000.00
	3 Dusun Tepian Danto	Dusun Tepian Danto	100,000,000.00
	4 Dusun Aur Gading	Dusun Aur Gading	100,000,000.00
	5 Dusun Kuamang	Dusun Kuamang	100,000,000.00
	6 Dusun LubukTenam	Dusun LubukTenam	100,000,000.00
	7 Dusun Pulau Batu	Dusun Pulau Batu	100,000,000.00
1.4	UPK Kecamatan Rimbo Tengah		200,000,000.00
	1 Dusun Sungai Buluh	Dusun Sungai Buluh	100,000,000.00
	2 Dusun Sungai Mengkuang	Dusun Sungai Mengkuang	100,000,000.00

15	UPK Kecamatan Bungo Dani		300,000,000.00
	1 Dusun Sungai Arang	Dusun Sungai Arang	100,000,000.00
	2 Dusun Talang Pantai	Dusun Talang Pantai	100,000,000.00
	3 Dusun Pulau Pekan	Dusun Pulau Pekan	100,000,000.00
16	UPK Kecamatan Bathin II Pelayang		500,000,000.00
	1 Dusun Talang Silkungko	Dusun Talang Silkungko	100,000,000.00
	2 Dusun Peninjau	Dusun Peninjau	100,000,000.00
	3 Dusun Pulau Kerakap	Dusun Pulau Kerakap	100,000,000.00
	4 Dusun Pelayang	Dusun Pelayang	100,000,000.00
	5 Dusun Seberang Jaya	Dusun Seberang Jaya	100,000,000.00

TELAH DITELUSI OLEH
KAB. BUNGO
NIP. 19.02.200312 1 002
H. ZUDIN, SE. WE
NIP. 19630808 199203 1 018

TELAH DITELUSI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG PUU
KABAG. HUKUM
HAMBALI, SH
NIP. 19760416 200212 1 005
SAHRAD HARIJADI, SH
NIP. 19660910 199303 1 004

Muara Bungo, Desember 2015

BUPATI BUNGO
H. SUDIRMAN ZAINI

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR : 31 TAHUN 2015
TENTANG
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
	Belanja Bantuan Sosial		0,00
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan		0,00
	Bantuan Sosial		0,00

TELAH DITELEITI OLEH :	
KAD. ANGGRAN, 	KEPALA BPAD, 
S. RINALIS, SE NIP. 190624 200312 1 002	H. ZUDIN, SE, ME NIP. 19630809 199203 1 010

TELAH DITELEITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PIU, 	KABAG HUKUM, 
H. ARSALI, SH NIP. 19760416 200211 1 004	H. HENDRI HARJIJADI, SH NIP. 19660910 199203 1 004

Muara Bungo, Desember 2015
BUPATI BUNGO

H. SUDIRMAN ZAINI